



PANCASILA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA ADALAH FONDASI INTEGRASI BANGSA INDONESIA

Nopentus Yudie Putra

Yayasan Tua' Sangau

Email: nopentusyudieri@gmail.com

Abstrak Penelitian ini mengkaji makna filosofis Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam konteks toleransi antar suku, ras, agama, dan golongan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggali akar historis dan signifikansi kedua konsep tersebut sebagai landasan integrasi bangsa. Penelitian ini menemukan bahwa Pancasila, sebagai sintesis dari berbagai ideologi global yang diadaptasi dalam konteks Indonesia, berfungsi sebagai dasar negara yang mempersatukan keberagaman. Sementara itu, Bhineka Tunggal Ika, yang berakar pada tradisi kemajemukan sejak zaman Majapahit, menjadi prinsip yang merefleksikan dimensi teologis-filosofis, politik kenegaraan, dan budaya Indonesia. Kedua konsep ini berperan penting dalam membangun dan memelihara toleransi serta kesatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Toleransi

Abstract This research examines the philosophical meaning of Pancasila and Bhineka Tunggal Ika in the context of tolerance between ethnicities, races, religions, and groups in Indonesia. Using library research methods and a descriptive approach, this research explores the historical roots and significance of the two concepts as the basis for national integration. This research finds that Pancasila, as a synthesis of various global ideologies adapted to the Indonesian context, functions as the foundation of the state that unites diversity. Meanwhile, Bhineka Tunggal Ika, which is rooted in the tradition of pluralism since the Majapahit era, is a principle that reflects the theological-philosophical, state political, and cultural dimensions of Indonesia. These two concepts play an important role in building and maintaining tolerance and unity amidst Indonesia's diversity.

Keywords: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Tolerance

A. PENDAHULUAN

Para pakar menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu diantara negara yang sedang berada dalam proses transisi menuju ekonomi maju. Hal ini sejalan dengan visi kolektif masyarakat Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045,

ketika bangsa ini mencapai usia satu abad, harapan besar tumbuh di hati setiap anak bangsa. Berbagai lembaga riset memproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi satu diantara pusat peradaban dunia, serta dipandang sebagai negara yang senantiasa dikagumi dan disanjung oleh bangsa-bangsa lain. Namun, semua proyeksi tersebut akan kehilangan relevansi jika kita hanya terbuai oleh sanjungan tanpa upaya nyata untuk maju.

Fondasi paling mendasar dalam mencapai kemajuan tersebut terletak pada pemahaman yang mendalam mengenai filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, sebagai dasar negara dan *philosofische grondslag* (filosofi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara), serta sebagai *staatsfundamentelnorm* negara Indonesia, harus dipahami secara utuh, terutama di tengah kehidupan masyarakat yang plural dan rentan terhadap konflik suku, agama, ras, dan antargolongan, begitupun dengan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika merupakan bagian dari empat pilar kebangsaan yang merupakan konsensus nasional dan harus terus disosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya di dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia.

Integrasi bangsa adalah proses penyatuan kelompok-kelompok sosial yang memiliki perbedaan kepribadian, latar belakang, dan nilai-nilai untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis (Soerjono Soekanto, 2009: 167). Menjaga integrasi bangsa sangat penting untuk mencapai visi negara menjadi makmur dan sejahtera di masa mendatang. Kesatuan negara tidak dapat terwujud tanpa adanya keberagaman; justru, perbedaan adalah dasar dari integrasi. Sebagai lawannya, disintegrasi, yang dapat mengancam persatuan dan keberlangsungan suatu negara, merupakan bahaya besar yang harus dihindari. Disintegrasi bangsa merupakan proses perpecahan atau keretakan dalam masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kesatuan dan persatuan, serta timbulnya konflik di antara kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya terintegrasi (Soerjono Soekanto, 2009: 168). Disintegrasi dapat timbul akibat pemahaman ideologi—termasuk agama, suku, ras, dan adat istiadat—yang ekstrem serta paksaan untuk mengadopsi pandangan tertentu. Perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang semacam ini harus dihindari, mengingat perjuangan keras para pendiri bangsa untuk menciptakan kesatuan di tanah Nusantara ini. Toleransi adalah unsur esensial dalam mengelola perbedaan. Mengingat pluralitas Indonesia yang meliputi berbagai pulau, suku, ras, bahasa, dan kepercayaan, menjaga dan memprioritaskan toleransi antarbangsa, antarsuku, serta antarumat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia saat ini.

Banyak peristiwa sejarah mengajarkan kita tentang kehancuran dan pecahnya suatu negara, diantaranya Kerajaan Majapahit, runtuhnya Imperium Romawi, dan bubarnya Kekaisaran Mongolia. Semua peristiwa ini terjadi akibat kurangnya kesatuan dan persatuan di antara elemen-elemen dalam kerajaan dan negara tersebut. Di negara kita sendiri, berbagai kasus telah mencederai esensi toleransi, seperti pelarangan pendirian tempat ibadah, perusakan rumah ibadah, pelarangan perayaan *Cap Go Meh*, pengaturan tata cara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah daerah, serta pelarangan bagi lawan jenis yang bukan suami-istri untuk tinggal bersama dalam satu atap berdasarkan perda di suatu daerah di Indonesia.

Dialog merupakan unsur penting yang dapat memecahkan banyak persoalan termasuk berbagai masalah dari suatu bangsa dan negara. Seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus di dalam ensikliknya yang berjudul *Fratelli Tutti*: Mendekati, berbicara, mendengarkan, memandang, mengenal, dan memahami satu sama lain, serta mencari kesamaan: semua ini dirangkum dalam satu kata “dialog.” Jika kita ingin bertemu dan saling membantu, kita harus berdialog. Tidak perlu saya menekankan manfaat dialog. Saya hanya perlu memikirkan seperti apa dunia kita tanpa dialog yang sabar dari banyak orang dermawan yang menjaga keluarga dan komunitas tetap bersatu. Berbeda dengan ketidaksetujuan dan

konflik, dialog yang terus-menerus dan penuh keberanian tidak membuat berita utama, tetapi diam-diam membantu dunia hidup jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan (Paus Fransiskus, 2020: 71). Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai fondasi fundamental negara Indonesia, berfungsi sebagai kerangka dialog antara berbagai bangsa, suku, ras, dan agama. Keduanya mencerminkan komitmen mendalam terhadap kerukunan dan kesatuan dalam keberagaman, sekaligus mengarahkan upaya kolektif untuk memastikan persatuan dan harmoni di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menggambarkan secara detail makna filosofi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam konteks toleransi antar suku, ras, agama, dan golongan.

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai makna filosofi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika serta dampaknya terhadap toleransi. Metode ini akan menganalisis dan menyajikan data-data dari sumber pustaka tanpa bertujuan untuk menguji hipotesis atau melakukan prediksi. Tujuan dari metode ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika mempengaruhi hubungan antar kelompok dalam masyarakat di Indonesia.

Sumber data artikel ini menggunakan identifikasi kolaboratif literatur yang relevan, yaitu mencari dokumen dan buku di *database online* yang paling relevan, dan perpustakaan *offline*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Filosofi Pancasila.

Dalam sidang BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat mengajukan pertanyaan penting mengenai dasar apa yang akan digunakan untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Pertanyaan ini memicu berbagai tanggapan dari peserta sidang, yang masing-masing mengemukakan pandangan mereka mengenai landasan yang tepat untuk negara yang baru dibentuk. Berdasarkan notulen Kongres Pemuda 1928, Bung Karno diakui sebagai tokoh utama yang menggali dan mengembangkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Penting bagi kita untuk memahami filosofi Bhineka Tunggal Ika beserta akar sejarahnya, agar kita mengerti mengapa negara ini harus dikelola dalam bingkai Pancasila, yang mengedepankan semangat perbedaan “berbeda-beda tetapi tetap satu.” Bung Karno menegaskan bahwa negara yang ingin kita bangun adalah sebuah *Nationalistisch Staat*, atau negara kebangsaan. Pernyataan Bung Karno tersebut sangat signifikan, karena sementara banyak bangsa lain tidak memiliki rujukan sejarah yang kuat untuk bersatu, kita sudah lama memiliki dasar yang kokoh untuk membangun persatuan dan kesatuan.

Nusantara tidak hanya sekadar gugusan pulau-pulau di antara dua benua, tetapi juga merupakan rangkaian gugusan nilai-nilai yang dinamis, yang berusaha dipahami dan diintegrasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam sejarah panjangnya. Oleh karena itu, Bung Karno menggambarkan Pancasila sebagai suatu konsep yang lebih tinggi dan lebih komprehensif dibandingkan dengan Manifesto Komunis maupun *Declaration of Independence of America*. Pancasila dianggap sebagai sintesis dari ideologi-ideologi besar dunia, yang mengintegrasikan berbagai pemikiran dan prinsip dalam satu dasar yang kokoh untuk negara Indonesia.

Dalam sejarahnya, Bung Karno memulai perjalanan intelektualnya dalam merenungkan dasar negara dengan mengunjungi Eropa Timur, di mana ia mempelajari teori komunisme yang dikembangkan oleh Friedrich Engels dan Karl Marx, tanpa menjadikannya sebagai penganut ideologi tersebut. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanannya ke Amerika Serikat untuk mempelajari *Declaration of Independence*, sebuah dokumen yang mendasari pemikiran liberal, meskipun ia tidak mengadopsi ideologi liberalisme secara keseluruhan. Kemudian, Bung Karno mengunjungi Tiongkok dan berdialog dengan Sun Yat-sen, sambil mendalami ideologi *San Min Chu I* yang menjadi salah satu inspirasi dalam perumusan dasar negara Pancasila. Perjalanannya berlanjut ke India, di mana ia mempelajari ajaran Mahatma Gandhi dan mengadopsi prinsip Gandhi, seperti pernyataan “*My Nationalism is Humanity*,” yang menekankan pentingnya kemanusiaan dalam nasionalisme. Akhirnya, setelah mendapatkan berbagai pengaruh dan wawasan dari berbagai pemikiran global, Bung Karno kembali ke tanah air dan berfokus pada realitas bangsa Indonesia. Di sini, ia menggali dan merumuskan Pancasila, berdasarkan nilai-nilai yang mendalam dan berakar kuat dalam kepribadian serta identitas bangsa Indonesia, menciptakan dasar negara yang mengintegrasikan berbagai inspirasi internasional dengan konteks lokal.

Nilai-nilai dari luar itu tidak ditolak oleh Bung Karno, melainkan direfleksikan ke dalam kepribadian bangsa Indonesia. Bung Karno menyatakan bahwa awal abad ke-20 menandai berdirinya negara-negara nasional sebagai reaksi terhadap kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Dalam konteks ini, lahirlah Pancasila sebagai penegasan anti segala bentuk penjajahan di muka bumi, termasuk kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Pada masa itu, dunia terbagi menjadi dua blok utama: blok komunis dan blok kapitalis. Namun, memasuki awal abad ke-21, dinamika global berubah seiring dengan runtuhnya negara induk dari sistem komunisme, yakni Uni Soviet. Dengan berakhirnya era komunisme di Uni Soviet, dunia barat kehilangan musuh dan mereka berusaha mencari musuh baru. Agen-agen kapitalis barat mencari lawan-lawan baru dan kambing hitam, yang kini berfokus pada radikalisme agama. Saat ini, dunia dihadapkan pada ancaman baru berupa radikalisme agama yang sering kali berkembang menjadi terorisme, menggantikan peran musuh yang dahulu dipegang oleh komunisme.

Akar dari terorisme sering kali berasal dari fundamentalisme agama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghapuskan paradigma agama yang fanatik dan cenderung ekstrim, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat kebangsaan kita yang tercermin dalam prinsip, nilai, dan makna dari Pancasila.

Pancasila adalah suatu sintesis dari berbagai ideologi besar dunia yang diadaptasikan dalam konteks keindonesiaan, berfungsi sebagai dasar yang menyatukan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka kebangsaan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip global ke dalam struktur sosial dan budaya Indonesia, Pancasila memberikan landasan yang kokoh untuk membangun persatuan nasional yang harmonis, sambil secara efektif mengatasi ancaman terhadap integrasi bangsa, seperti fundamentalisme agama dan ideologi radikal lainnya. Sebagai dasar negara, Pancasila mengarahkan upaya kolektif dalam memperkuat rasa kebangsaan dan memelihara kesatuan di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Itulah makna filosofi dari Pancasila sebagai dasar negara dan *philosophische grondslag*.

2. Makna Filosofi Bhineka Tunggal Ika.

a. Bhineka Tunggal Ika Sebagai Tradisi Kemajemukan.

Ketika banyak bangsa di dunia, khususnya di negara-negara Barat, belum memikirkan mengenai konsep kesetaraan di dalam pluralisme atau kemajemukan, Indonesia telah memiliki konsep Bhineka Tunggal Ika sejak abad ke-14, yaitu sekitar tahun 1380-an. Pada masa itu, Eropa dan Timur Tengah sedang terlibat dalam Perang Salib, dan Indonesia sudah mengadopsi prinsip keberagaman dan kesatuan jauh sebelum munculnya kesadaran tentang hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum di dunia Barat. Indonesia sudah menerapkan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa Bhineka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, melainkan merupakan fondasi yang mendalam dan bersejarah dalam struktur kebangsaan Indonesia.

Asal usul prinsip Bhineka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular, seorang pujangga dan negarawan dari zaman Majapahit. Ia menuliskan prinsip ini dalam karya sastra epiknya yang dikenal sebagai Kakawin Sutasoma, ia mengungkapkan suatu syair seperti ini: "*Ruanika Datu Winuhus Warabhudhawiswara, Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*" yang berarti, "Yang bijaksana dan memiliki pengetahuan luas, berbeda-beda tetapi tetap satu; tidak ada hukum yang lebih tinggi dari ini." Makna dari Bhineka Tunggal Ika adalah prinsip untuk membangun kerukunan antaragama dan budaya di masa lalu. Inilah alasan mengapa Bung Karno menyebut Majapahit sebagai *Nationalistisch Staat* (Negara Nasional atau Negara Kebangsaan). Meskipun Mataram adalah negara merdeka dan Demak serta Kesultanan Ternate-Tidore adalah negara berdaulat, mereka tidak dianggap sebagai negara nasional. Sebaliknya, Majapahit dan Sriwijaya adalah dua contoh negara nasional yang pernah ada di bumi Indonesia. Negara-negara ini disebut sebagai negara nasional karena meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Hindu dan Buddha, mereka tidak pernah mengidentifikasikan diri sebagai negara Hindu atau Buddha, melainkan sebagai negara yang menghargai keberagaman.

Bhineka Tunggal Ika direfleksikan melalui tiga dimensi utama: teologis-filosofis, politik kenegaraan, dan budaya. Pada dasarnya, teks ini bukan tentang menyamakan, tetapi tentang mempersamakan, yakni menyatukan berbagai kepentingan rakyat yang berbeda. Mpu Tantular, dalam Sutasoma, dengan bijak menyatakan, "Siwa dan Buddha memang tampak berbeda, tetapi pada hakikatnya, keduanya adalah satu. Berbeda-beda namun tetap satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua." Pernyataan ini mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, substansi kebenaran tetaplah satu, menekankan pentingnya harmoni dan persatuan dalam keragaman.

Kemajemukan agama dipandang sebagai jamaknya manifestasi dari satu kebenaran tunggal, yang dalam bahasa Jawa Kuno diungkapkan dengan istilah *Tanhana Dharma Mangrwa*, yang berarti "tidak ada kebenaran yang mendua." Prinsip ini ditegaskan kembali oleh Mpu Prapanca dalam karyanya yang monumental, yaitu Negarakertagama. Di dalamnya, ia menulis, "Sang Pelindung yang Maha Mutlak, Raja Penguasa Alam, Tuhan yang melampaui segala konsep Ketuhanan yang berbeda-beda." Inilah esensi dari konsep

“Ketuhanan Yang Maha Esa,” di mana Tuhan dipahami sebagai entitas tertinggi yang berada di atas segala keragaman keyakinan dan kepercayaan. Filosofi ini mencerminkan pandangan mendalam tentang keesaan dalam keragaman, yang menjadi dasar penting bagi harmoni dan kesatuan bangsa. Negara tidak mencampuri urusan internal atau forum internum dari keyakinan masing-masing warganya. Namun, di atas segala agama yang dianut oleh rakyat pada waktu itu, negara secara tegas mengakui dan menjunjung tinggi konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini memastikan bahwa negara menghormati kebebasan beragama sambil menjaga landasan spiritual yang menyatukan seluruh elemen bangsa, tanpa memaksakan satu keyakinan tertentu. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pelindung pluralisme, sementara tetap berpegang pada nilai-nilai Ketuhanan yang menjadi pedoman moral dan etis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para pendiri bangsa kita mengambil pelajaran berharga dari sejarah kejayaan Majapahit dan Sriwijaya. Dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* (BPUPKI), mereka menafsirkan Bhineka Tunggal Ika bukan hanya sebagai seloka yang merujuk pada pluralisme agama, tetapi sebagai prinsip yang mencakup dimensi kehidupan kebangsaan yang lebih luas dan kompleks. Bhineka Tunggal Ika dipahami sebagai landasan yang menyatukan berbagai etnis, suku, adat istiadat, bahasa, ras, dan semua keragaman yang ada di Nusantara, untuk membentuk suatu identitas nasional yang kokoh. Prinsip ini mencerminkan kesadaran mendalam bahwa persatuan bangsa Indonesia tidak dibangun atas keseragaman, melainkan melalui pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada di seluruh penjuru tanah air.

b. Bhineka Tunggal Ika Sebagai Nilai Teologi.

Akar budaya religiusitas bangsa Indonesia telah tertanam jauh sebelum masuknya agama-agama dari luar. Sejak masa lampau, bangsa ini telah meyakini adanya Ketuhanan Yang Maha Esa, atau keberadaan entitas adikodrati yang diistilahkan sebagai “Yang.” Dalam perkembangan bahasa, konsep ini muncul dalam kata “SembahYang,” yang bermakna “sembah Yang”—di mana “Yang” berarti Tuhan, sehingga “SembahYang” berarti menyembah Tuhan. Keyakinan yang mengakar kuat ini mencapai puncaknya pada masa Majapahit, di mana kepercayaan tersebut menjadi bagian dari refleksi kebangsaan yang dituangkan dalam konsep Bhineka Tunggal Ika. Pengaruh luar yang datang, baik melalui agama maupun budaya, diterima dengan keterbukaan, namun tetap direfleksikan dan diselaraskan dengan nilai-nilai dan filosofi asli bangsa Indonesia. Filosofi inilah yang menjadi landasan spiritual bangsa dalam menerima dan mengelola keragaman tanpa mengorbankan identitas nasionalnya.

Dalam naskah Sunda abad ke-5, yaitu *Siskakanda Ng Karesian*, tercantum ajaran yang berbunyi: “Mangkubumi bakti diratu, ratubakti didewata, dewatabakti diyang.” Ajaran ini menggambarkan hierarki spiritual yang mendalam, di mana seorang menteri setia dan tunduk kepada raja, raja tunduk kepada dewa-dewa yang mewakili agama-agama, dan agama-agama pada akhirnya tunduk kepada prinsip tertinggi, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemikiran ini menunjukkan adanya konsep universal bahwa seluruh tatanan kekuasaan dan kepercayaan berakhir pada satu sumber kebenaran

tertinggi—Tuhan. Filosofi ini mencerminkan pandangan religius yang komprehensif di mana agama-agama yang berbeda-beda tetap terhubung dan berada di bawah satu prinsip Ketuhanan yang mempersatukan.

Atas dasar semangat kesatuan itulah yang membuat para pemuda di seluruh bumi Nusantara berkumpul dan mengikrarkan sumpahnya pada kongres pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen krusial dalam perjalanan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemuda dari berbagai belahan Nusantara, dengan beragam latarbelakang etnis, budaya, dan sosial, berkumpul dalam sebuah forum yang menjadi cikal bakal pemersatu bangsa yang terpecah-belah oleh penjajahan dan perbedaan lokal; dalam kongres ini, mereka secara kolektif merumuskan dan mengikrarkan tiga janji utama yakni bertanah air satu, yaitu Indonesia; berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia; dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, yang tidak hanya mencerminkan aspirasi untuk menghapus sekat-sekat perbedaan kedaerahan dan etnis, tetapi juga menegaskan tekad bersama untuk menciptakan identitas nasional yang tunggal dan solid sebagai landasan utama dalam perjuangan melawan kolonialisme dan dalam mewujudkan kemerdekaan yang hakiki; hasil dari kongres ini adalah sebuah momentum historis yang memberikan dorongan moral dan ideologis bagi gerakan nasionalis di seluruh tanah air, serta menetapkan prinsip-prinsip persatuan yang menjadi pondasi kuat bagi berdirinya negara Indonesia merdeka dan yang terus memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional hingga saat ini.

Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan di dalam sejarah budaya bangsa Indonesia adalah warisan mulia dan luhur yang lebih berharga dari apapun.

D. KESIMPULAN

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika merupakan fondasi filosofis yang krusial bagi persatuan dan integrasi bangsa Indonesia. Pancasila, sebagai hasil sintesis berbagai pemikiran global yang disesuaikan dengan konteks lokal, menjadi landasan ideologis yang mempersatukan berbagai elemen bangsa. Sementara itu, Bhineka Tunggal Ika, yang berakar pada tradisi toleransi dan kemajemukan sejak era Majapahit, menjadi prinsip yang merefleksikan keberagaman Indonesia dalam dimensi teologis, politik, dan budaya.

Kedua konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga sangat penting dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti radikalisme agama dan ancaman disintegrasi. Pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dipandang sebagai kunci untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang harmonis dalam keberagamannya.

Dialog antar kelompok menjadi hal yang paling penting, penghargaan terhadap keberagaman, dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan sebagai cara untuk memperkuat integrasi nasional. Dengan demikian, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika tidak hanya dilihat sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai panduan aktif dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih toleran, bersatu, dan maju, terutama di dalam mencapai visi kolektif Indonesia Emas 2045.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Rizka Khairi, Sulaikha Sulaikha Marito, Nurul Fadhila Ibrahim (2023) Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa. Vol. 1, No. 1. *Jurnal Riset, Pendidikan, dan Ilmu Sosial*. Tersedia pada: <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/jurnaltips/article/view/2657>
- KADIN. (2024). *Peta Jalan Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koesuma, R. (Ed.) (1984) Notulen Kongres Pemuda 1928. Yogyakarta: Universitas Indonesia.
- Al Jihad, Sadam (2018) *Pancasila Ideologi Dunia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Mastuti, D. W. R., & Bramatyo, H. (Trans.) (2019) *Mpu Tantular kakawin Sutasoma*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Paus Fransiskus (2020). *Fratelli Tutti*. Vatikan. Available at: Tersedia pada: https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
- Noorsena, Bambang. *Tuhan Yang Maha Esa Bukan Monopoli Agama*. Komunitas Salihara. Available at: Tersedia pada: <https://id.scribd.com/doc/213682038/BAMBANG-NOORSENA-Tuhan-Yang-Maha-Esa-Bukan-Monopoli-Agama8r6e75>